

## AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Tony Gunawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[tonigunawan678910@gmail.com](mailto:tonigunawan678910@gmail.com)<sup>1)</sup>

### **Abstract:**

*This research method uses quantitative data collection and analysis, accountability of state financial supervision is a fundamental principle in good governance to ensure the use of public budgets is transparent, efficient, and in accordance with laws and regulations. This paper discusses the concept, mechanisms, and challenges of accountability in state financial supervision in Indonesia. With effective and accountable supervision, public trust in state financial management can be increased, so that the risk of corruption and budget waste can be minimized. Accountability is not merely an administrative obligation but a prerequisite for the legitimacy and sustainability of national development and must be accounted for or answered and indicate the performance and actions of a person/leader of an organizational unit to the party who has the right or authority to request accountability in the form of a report using the principle that every state financial management activity must be accountable to the people. State financial accountability must be managed properly both transparently and accountably. The existence of accountability reports, the ease of access to public information related to state finances, in this concept, a person who is given a mandate or position in this world must be accountable for everything he does, accountable before humans as leaders and the community and accountable before Allah SWT according to the mandate given.*

**Keywords:** *Accountability, State Financial Supervision.*

### **Abstrak:**

Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif melakukan pengumpulan dan analisis data, akuntabilitas pengawasan keuangan negara merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan transparan, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Tulisan ini membahas konsep, mekanisme, dan tantangan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan negara di Indonesia. Dengan pengawasan yang efektif dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dapat meningkat, sehingga risiko korupsi dan pemborosan anggaran dapat diminimalisir. Akuntabilitas bukan sekedar kewajiban administratif melainkan prasyarat bagi legitimasi dan keberlanjutan pembangunan nasional dan harus dipertanggungjawabkan atau menjawab dan menandakan kinerja serta tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi pada pihak yang mempunyai hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa hasil laporan menggunakan prinsip bahwa setiap aktivitas pengelolaan keuangan negara harus bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Akuntabilitas keuangan negara harus dikelola dengan sebagaimana mestinya baik secara transparan atau akuntabel. Adanya laporan surat pertanggungjawaban, adanya kemudahan akses informasi publik terkait keuangan negara, dalam konsep ini bahwa seorang yang diberikan amanah atau jabatan didunia ini harus dipertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukan, dipertanggungjawabkan dihadapan manusia selaku pimpinan maupun masyarakat dan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sesuai amanah yang diberikan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Negara.

## PENDAHULUAN

Batas kata untuk satu naskah adalah 4000-10.000 kata, kertas A4. <sup>1</sup> Latar belakang berisi masalah yang didiskusikan di dalam naskah.<sup>2</sup> Pada akhir paragraph, penulis harus memberikan komentar atau kesimpulan tentang identifikasi masalah dan tujuan dari penelitian. TNR-12 pt dan 1,5 spasi. <sup>3</sup>(times new roman 11 pt )

## METODE

Metode ditulis dengan deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metode atau pendekatan penelitian.<sup>4</sup> Metode ini opsional. <sup>5</sup> TNR-12 pt dan 1,5 spasi.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Memuat uraian pembahasan penelitian dan analisis isi yang ada di dalamnya untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan dalam memberikan jawaban/solusi terhadap masalah penelitian. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat menggunakan penulisan sub judul seperti di bawah ini

### Sub Judul

1. Sub-sub judul
2. Sub-sub judul
  - a. Judul poin
  - b. Judul poin

Penelitian yang mengandung Tabel dan/atau Gambar, usahakan tabel jangan terpotong pada halaman yang berbeda, kecuali jika besarnya melebihi satu halaman. Jika harus terpotong, tulis ulang *header row* untuk setiap kolomnya, diberi nomor urut tabel yang sama, dan judul diganti dengan *Lanjutan*. Judul tabel tidak diakhiri dengan titik.

**Tabel 1: Judul Tabel**

No	Keterangan 1	Keterangan 2	Keterangan 3

Sumber: Penulis, Judul Buku, Tahun Publikasi (TNR-11 pt).

<sup>1</sup> Annalisa Yahanan, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mangku Bumi, 2017), 15.

<sup>2</sup> Sulistyowati Irianto (Ed). *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017), 43.

<sup>3</sup> Happy Warsito, et al., *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: Universitas Sriwijaya Publisher, 2010), 30-35.

<sup>4</sup> Irwansyah, “Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*. 21 (2), 2017, hlm. 231.

<sup>5</sup> Salawati Mat Basir, Rohani Abdul Rahim, “Penghijrahan Buruh Migran dan Keperluan Kepada Rejim Migrasi Antarabangsa” dalam Kamal Halili Hassan (Ed). *Buruh Asing dan Migrasi Isu Perundangan*, 2016, hlm. 123.

## KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dibahas. Simpulan tidak dibuat poin-poin, tetapi dideskripsikan dalam bentuk alinea. TNR-12 pt dan 1,5 spasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka terdapat pada bagian akhir naskah. Semua publikasi yang dikutip harus dimasukkan sebagai daftar. Disusun menurut abjad, seperti contoh berikut:

Butt, Simon and Tim Lindsey. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Gunakaya, A. Widiada. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: STHB Press, 2015.

———. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edited by Tarmizi. Ed. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Imaniyati, Neni Sri, Asep Rozali, dan Neneng Nurhasanah. *Menimbang Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Universitas Islam Bandung, 2017.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 *tentang Penanaman Modal*, Pub. L. No. 67 Tahun 2007.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 863 K/PDT/2020 (2020).

Nott, Jemma. "China's Belt and Road (BRI): Investment and Lending Practices in Developing Countries. Is There a 'Debt Trap'?" <https://www.globalresearch.ca/chinas-belt-and-road-bri-investment-and-lending-practices-in-developing-countries-is-there-a-debt-trap/5722107>, 2020.

Priyatno, Dwidja dan Kristian. *Delik Agama (Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum Dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Perancis, Kanada, Latvia, dan Finlandia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019.

Saragih, Bonarsius. "Kebijakan Pengawasan Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Sebagai Penegak Hukum Yang Profesional Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2015).

Soenandar, Taryana, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dan Heru Soeprapto. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Stamper, Kory. "From 'F-Bomb' to 'Photobomb,' How the Dictionary Keeps Up with English." Interview by Terry Gross, 19 April 2017.

Sugiarto, Irwan. "The Significance of Good Corporate Governance Principles in The Company Law of 2007." *Mimbar: Sosial Dan Pembangunan* 33, No. 1 (2017): 37–45. doi:<http://dx.doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2067>.

Taufik, Giri Ahmad. 'Freeport Dan Posisi Hukum RI'. *Kompas*, 20 March 2017.

Widyantini, Rini, *et.al.* *Bunga Rampai Pertanggungjawaban Hukum Diskresi Pasca Berlakunya*

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Edited by Zainal Muttaqin. Bandung: Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017.

Winata, Agung Sujati. "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2018).